

**PENGARUH PENERAPAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru)**

SKRIPSI

OLEH

RAHMADONA SANJAYA
NIM : 10973007015



**PROGRAM S.1
JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

**PENGARUH PENERAPAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi
Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru*

OLEH

RAHMADONA SANJAYA
NIM : 10973007015



**PROGRAM S.1
JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

**PENGARUH PENERAPAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru)**

ABSTRAK

OLEH :

**RAHMADONA SANJAYA
NIM : 10973007015**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari penerapan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji linearitas, uji analisis statistik, uji analisis korelasi sederhana, uji analisis regresi sederhana, uji koefisien regresi sederhana (uji T), dan uji koefisien determinasi (uji R^2).

Hasil uji analisis korelasi sederhana menunjukkan bahwa korelasi penagihan pajak dengan surat paksa (X) sebesar 0,914 > dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji T menunjukkan bahwa t_{hitung} untuk variabel penagihan pajak dengan surat paksa (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 13,097, berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($13,097 > 2,032$), dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji R^2 nilai koefisien determinasi sebesar 0,830 atau 83%, yang berarti bahwa 83% variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) bisa dijelaskan oleh variabel independen (penagihan pajak dengan surat paksa).

Kata kunci : Wajib Pajak, Surat Paksa, Kepatuhan Wajib Pajak.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan terhadap kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

(Studi Empiris pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru)”.

Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa penulis rindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Skripsi ini ditulis dan diajukan dengan maksud untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, baik dari segi materi maupun penulisannya.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nazir, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Kedua Orangtuaku tercinta, Papahanda Drs. H. Djasni Syam, M.Ed dan Mamahanda Hj. Sanidar, SPd yang telah mendidik, membesarkan penulis dengan penuh cinta kasih sayang, dan memberi motivasi tiada henti agar penulis menjadi orang yang berhasil dan berbakti kepada orang tua. Semoga penulis mampu menjadi apa yang mereka harapkan. AMIN. Untuk Abangku Tersayang Donny Berthus, ST; Abangku Tersayang Juneo Giganta, ST; Kakakku Tersayang Dessy Mayasari; Abangku Tersayang David Sanjaya, S.Psi; dan Kakak Iparku Winarsih, Amd. Keb; Kakak Iparku Elva Lestari; dan Kakak Iparku Wiyanti Canggraeni, S.Kes yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk penulis.
4. Bapak Dony Martias, SE, MM. selaku Ketua Jurusan Program Studi Akutansi Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengarahan-pengarahan dan masukan-masukan yang bermanfaat kepada penulis.
5. Ibu Desrir Miftah, SE, AK selaku Seketaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu penulis.
6. Terima kasih buat pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Hj. Oechie Nadhira, SE, M.Ak, Ak selaku Penasehat Akademi dan dosen konsultasi prososal yang telah banyak membantu membimbing penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen selaku staf pengajar yang telah mendidik penulis selama perkuliahan, karyawan serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih atas bantuannya.

9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kepala Bidang P2Humas, seluruh staf dan karyawan terkhususnya kepada Bang Septriadi selaku staf pelaksana bidang P2Humas di Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau yang telah membantu penulis dalam membuat surat izin riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.
10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru, seluruh staf dan karyawan terkhususnya kepada Bapak David Samosir dan Bang Andi selaku staf bidang umum yang telah banyak membantu penulis mendapatkan data serta informasi yang penulis perlukan hingga selesainya skripsi ini. Juga kepada Bapak Deni selaku staf penagihan pajak yang telah membantu penulis memberikan data surat paksa yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
11. Sahabat dan teman-teman Akuntansi Lokal D Angkatan 2009 dan teman-teman Konsentrasi Pajak Angkatan 2009 terima kasih atas motivasi selama ini, bahu membahu saling membantu, menemani dalam suka dan duka, dalam tawa dan air mata, terima kasih atas persahabatan kita, senda gurau yang sangat menghibur dikala bersama. Seluruh teman-teman seperjuangan Dewi, Nurfahmi, Weni, Sri, Ellen, Eko dan yang lainnya. Semoga perjuangan kita ini tidak sia-sia dan Insya Allah akan kita rasakan manfaatnya dikemudian hari. Semoga kita menjadi orang yang sukses dan berbakti kepada Negara, Bangsa dan Agama. AMIN ...

12. Terima kasih buat Adi Salman yang telah banyak memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik mereka atas bantuan, motivasi, dan bimbingan yang diberikan kepada penulis, serta melimpahkan rahmat dan hidayah_Nya kepada kita semua, Amin Ya Robbal' alamin.

Wa'alaikumsallam *Wr.Wb*

Pekanbaru, 23 April 2013
Penulis

RAHMADONA SANJAYA
NIM : 10973007015

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pajak	
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Jenis Pajak	8
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.2 Penagihan Pajak	
2.2.1 Pengertian Penagihan Pajak	10
2.2.2 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	14
2.2.3 Tindakan Penagihan Pajak	15
a. Penagihan Pasif	15
b. Penagihan Aktif	16
1. Surat Teguran	16

2. Surat Paksa	17
3. Surat Penyitaan	20
4. Lelang	20
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak	
2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.3.2 Teori Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.3.3 Kriteria Wajib Pajak Patuh	24
2.4 Kerangka Pemikiran	25
2.5 Pajak dalam Pandangan Islam	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	
3.1.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
3.1.2 Data dan Jenis Data	29
3.1.3 Definisi Operasional	30
3.1.4 Pengukuran Variabel	31
3.1.5 Model Penelitian	31
3.1.6 Hipotesis	32
3.1.7 Populasi dan Sampel	32
3.2 Analisis Data dan Uji Hipotesis	
3.2.1 Uji Linearitas	34
3.2.2 Statistik Deskriptif	34
3.3 Teknik Analisis	
3.3.1 Analisis Regresi Linear Sederhana	34
3.3.2 Analisis Korelasi Sederhana	35
3.4 Uji Hipotesis	
3.4.1 Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji T)	36
3.4.2 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya KPP Pratama Tampan Pekanbaru	40
4.1.2 Gambaran Umum KPP Pratama Tampan Pekanbaru	41
4.1.3 Tugas dan Wewenang KPP Pratama Tampan Pekanbaru	41

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 WP Terdaftar pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru	44
4.2.2 Potensi Pajak dan Prospek Pajak di KPP Pratama Tampan Pekanbaru	45
4.2.3 Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	48

4.3 Analisis dan Pengujian Hipotesis

4.3.1 Analisis Data

a. Uji Lineritas	50
b. Statistik Deskriptif	51
c. Analisis Korelasi Sederhana	52
d. Analisis Regresi Sederhana	53

4.3.2 Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji T)	54
b. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)	56

4.4 Pembahasan	56
----------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka dibutuhkan dana yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Sejak awal tahun 1984 Indonesia menganut sistem pemungutan pajak “*self asessment*”. *Self asessment* mengandung arti bahwa wajib pajak (*tax payer*) diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang kepada negara melalui SPT yang dibagikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Soemitro (2004: 15) menyatakan bahwa keberhasilan sistem *self asessment* akan ditentukan oleh (1) kesadaran pajak dari wajib pajak, (2) kejujuran wajib pajak, (3) hasrat untuk membayar pajak, dan (4) *tax dicipline* Mardiasmo, 2006:15. Menurut pendapat ini, bertambahnya jumlah wajib pajak yang disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat. Lebih spesifik lagi dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman mereka

terhadap ketentuan perpajakan.

Dari sisi pajak terdapat 2 faktor utama yang mendukung keberhasilan tingkat kepatuhan wajib pajak melaksanakan sistem *self asesment* yaitu faktor kesadaran wajib pajak dan pengetahuan atau pemahaman (Pamungkas, 2004). Sedangkan dari sisi Direktorat Jenderal Pajak terdapat 3 faktor yang mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan sistem *self asesment* yaitu penyuluhan (sosialisasi) perpajakan, pelayanan perpajakan, dan pengawasan perpajakan (Hutagaol, 2005). Adapun yang menyebabkan tidak patuhnya wajib pajak melaksanakan sistem *self asesment* disebabkan karena tidak relevannya buku petunjuk pengisian SPT dan sering berubahnya format SPT yang memusingkan wajib pajak (Hamdan, 2002).

Kepatuhan perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan (235/KMK.03/2003) Pasal 1 yaitu wajib pajak dikatakan patuh apabila: (1) benar dalam perhitungan pajak terutang, (2) benar dalam pengisian formulir SPT, (3) tepat waktu, (4) melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar pajak masih rendah, salah satunya ditunjukkan dengan paling rendahnya *tax ratio* Indonesia di kawasan ASEAN dibandingkan dengan *tax ratio* Malaysia (20,17%), Singapura (21,4%), Brunei Darussalam (8,8%), Thailand (17,27%) (Gunadi, 2002).

Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) menyatakan jumlah tunggakan pajak yang belum tertagih sampai akhir tahun 2010 mencapai Rp 70 triliun (www.detikfinance.com). Oleh karena itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa yakni salah satunya dengan menerbitkan surat paksa kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dengan Undang-Undang penagihan pajak diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara.

Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan oleh Purnawan (2004) yang meneliti tentang “Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Kaitannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak dan Aspek Keadilannya”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya bukan karena takut kena sanksi, melainkan wujud dari tanggung jawab dan kesadaran akan arti pentingnya pajak bagi pembangunan dan di sisi lain pemerintah harus meningkatkan pelayanan kepada publik sebagai wujud tanggung jawabnya kepada masyarakat. Sedangkan penelitian Wijoyanti (2010) yang meneliti tentang “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menunjukkan bahwa setelah wajib pajak mendapatkan penagihan pajak dengan surat paksa maka wajib pajak akan melakukan

kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“PENGARUH PENERAPAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”**.

(Studi Empiris pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu **“Apakah penerapan penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru?”**.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan surat paksa.
- b. Bagi perusahaan, dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru yang menjadi obyek penelitian agar dapat

meningkatkan kinerja dan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

- c. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah bacaan serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

1.4 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan bagian seksi penagihan pajak dan seksi administrasi.
- b. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperlukan seperti data jumlah surat paksa yang disampaikan dan dilunasi periode 2009-2011.

1.4.2 Jenis data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data jumlah surat paksa yang disampaikan dan dilunasi periode 2009-2011.

1.4.3 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

1.5 Sistematika Penelitian

Secara garis besar pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan telaah pustaka yang berisi teori-teori tentang pajak, penagihan pajak, prosedur penagihan dengan surat paksa, kepatuhan wajib pajak, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian, model penelitian, hipotesis, analisis data dan uji hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan penelitian dan saran-saran yang diharapkan berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Soemitro (2004:1), adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut Undang-Undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2011: 2).

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak tanpa mendapat jasa imbal yang berguna untuk membiayai pengeluaran negara.

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini dapat memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik oleh negara maupun warganya.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:1), terdapat 2 fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Ilyas (2007:8) dapat digolongkan menjadi 3 macam yaitu pajak menurut sifat, golongan dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut Sifat

i) Pajak Subyektif

Adalah pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya memperhatikan keadaan dari wajib pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

ii) Pajak Obyektif

Adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan dari wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Menurut Golongan

i) Pajak Langsung

Adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

ii) Tidak Langsung

Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Menurut Lembaga Pemungut

i) Pajak Pusat (Negara)

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah, Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

ii) Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomor 34 Tahun 2000. Pajak daerah dibedakan menjadi 2, yaitu:

(a) Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Penghasilan, dan Pemanfaatan Air di bawah Tanah dan Air Permukaan.

(b) Pajak Kabupaten atau Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

2.2 Penagihan Pajak

2.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan (seksi penagihan) di Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak terhadap wajib pajak apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi (www.wikiapbn.org/artikel/Penagihan_Pajak).

Definisi penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Pajak khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang (Mardiasmo, 2006:119). Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Pajak khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan.

Pada dasarnya besarnya utang pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penghitungan pajak terhutang tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Dalam hal tagihan pajak tersebut tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa.

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda, dan atau bunga (Mardiasmo, 2006:42).

Adapun sebab diterbitkannya STP antara lain:

- a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
- b. Berdasarkan penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap
- f. PKP melaporkan faktur tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak
- g. PKP yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar (Mardiasmo, 2006:39). Sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan (SKPKBT) menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah :

1. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya).
2. SKPKBT dapat diterbitkan oleh Dirjen Pajak dalam jangka 10 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang.
3. Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
4. Kenaikan sebesar 100% tersebut tidak dikenakan apabila SKPKBT tersebut diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Dirjen Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Apabila jangka waktu 10 tahun tersebut telah lewat, SKPKBT tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi bunga sebesar 48% dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal wajib pajak setelah lewat 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dasar penagihan pajak, antara lain:

- a. Surat Tagihan Pajak (STP).

- b. Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
- d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
- e. Surat Keputusan Pembetulan.
- f. Putusan Banding.
- g. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- h. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
- i. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
- j. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB).
- k. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT).
- l. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB).
- m. Surat Ketetapan sejenis yang memuat besarnya jumlah utang pajak.

2.2.2 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Setiap wajib pajak mempunyai kewajiban dan hak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Kewajiban wajib pajak diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- 2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- 3. Mengisi dengan benar SPT dan memasukan ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan.

4. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Adapun hak wajib pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan pemasukkan SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan yang salah.
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10. Apabila pajak terutang wajib pajak dipotong oleh pemberi kerja, wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan surat permohonan pajak.

2.2.3 Tindakan Penagihan Pajak

Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk tindakan penagihan yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif.

a. Penagihan Pasif

Penagihan pasif adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara memberikan himbauan kepada wajib pajak agar melakukan

pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding.

b. Penagihan Aktif

Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Jika dalam jangka waktu 30 hari utang pajak belum juga dilunasi maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak yang diawali dengan menerbitkan surat teguran dan menyampaikan surat paksa.

Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu:

1. Surat Teguran

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan aktif oleh fiskus untuk memperingatkan wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Definisi surat teguran menurut Rusdji (2005:23), yaitu surat yang diterbitkan oleh pejabat berwenang untuk menegur wajib pajak agar melunasi utang pajaknya. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat berwenang

untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB, atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu 7 hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya SPT, SKPKB, atau SKPKBT. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 561/KMK.04/2000 Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa surat teguran tidak diterbitkan terhadap wajib pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

2. Surat Paksa

Jika utang pajak setelah lewat 21 hari dari tanggal surat teguran diterbitkan tidak dilunasi maka diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak sebesar Rp 50.000. Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak.

a. Pengertian Surat Paksa

Pengertian Surat Paksa telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang berbunyi: surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Sedangkan menurut Rusdji (2005:25), yaitu surat yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang

diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.

b. Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut Eugenia Liliawati Mulyono dalam bukunya “Tanya Jawab Penagihan Pajak dengan Surat Paksa” menyebutkan dasar hukum penagihan pajak dengan surat paksa adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/KMK.04/1998 Tentang Penunjukan Pejabat Untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak.
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148/KMK.04/1998 Tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa.

7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/KMK.04/1998 Tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Juru Sita Pajak (Liliawati, 1999:18).

c. Ciri-ciri dan Kriteria Surat Paksa

Sebagai surat yang mempunyai kuasa hukum yang pasif, tentu memiliki ciri-ciri dan kriteria tersendiri. Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Nama wajib pajak.
2. Dasar penagihan.
3. Besarnya utang pajak.
4. Perintah untuk membayar.

Selain kriteria di atas, surat paksa juga mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan pengadilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding.
2. Mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan *grosse* akte, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya.
4. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan.

3. Surat Penyitaan

Surat penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat paksa. Jika utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa disampaikan oleh juru sita pajak tidak dilunasi, maka menurut Pasal 2 ayat (1) UU Penagihan Pajak, dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 100.000.

Dalam penagihan pajak dengan surat paksa, juru sita pajak berwenang melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan wajib pajak. Tujuan dilakukannya penyitaan adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari wajib pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan dengan Surat Paksa, penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang dengan penanggungan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

4. Lelang

Jika dalam jangka waktu paling singkat empat belas hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum juga dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat empat belas hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan

dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Pengertian lelang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.01/2002, adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Pengertian lelang menurut Rusdji (2005:26), yaitu setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui pengumpulan calon pembeli.

1. Syarat-syarat lelang:

- a. Lelang dilakukan di muka umum.
- b. Lelang dilakukan berdasarkan hukum.
- c. Lelang dilakukan di hadapan pejabat.
- d. Lelang dilakukan dengan penawaran harga.
- e. Lelang dilakukan dengan usaha pengumpulan peminat.
- f. Lelang ditutup dengan berita acara.

2. Pelaksanaan Lelang

Juru sita pajak datang ke tempat dimana barang-barang sitaan itu akan dilelang untuk mendampingi juru lelang. Juru lelang mengumumkan kepada para calon pembeli tentang syarat-syarat apa yang harus dipenuhi serta cara-cara penawarannya. Wajib pajak berhak menentukan urutan nama barang-barang yang disita akan dilelang. Jika hasil penjualan barang telah mencapai

jumlah utang pajak ditambah dengan biaya penagihannya maka penjualan tersebut dihentikan dan sisa barang dikembalikan kepada wajib pajak. Setelah selesai pelelangan maka kantor lelang, juru sita atau orang yang disertai untuk menjual barang-barang sitaan melaporkan kepada atasannya dengan membuat laporan hasil pelaksanaan lelang.

3. Pembatalan Lelang

Pembatalan lelang dapat dilakukan apabila wajib pajak melunasi utang pajak serta biaya penagihannya sesudah pengumuman lelang dimuat di media masa, media cetak, atau media elektronik tetapi sebelum pembatalan wajib pajak yang bersangkutan harus menunjukkan bukti pembayaran utang pajak dan penagihannya.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan pajak menurut Zain (2003:31), adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Sedangkan menurut Nurmantu (2003 : 110), mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam

melaksanakan hak perpajakannya.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan taat atau patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku. Ada 2 macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi Undang-Undang.

2.3.2 Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:83) menyatakan bahwa secara umum teori tentang kepatuhan dapat digolongkan dalam teori paksaan dan teori konsensus.

a. Teori Paksaan

Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari pemerintah. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa paksaan fisik sebagai monopoli penguasa adalah dasar terciptanya suatu ketertiban untuk tujuan hukum. Jadi menurut teori paksaan, unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum. Persoalannya, apabila suatu kaidah hukum hanya berdasarkan pada sanksi sebagai

tuntutan ditaatinya hukum justru akan mengurangi wibawa hukum, baik terhadap hukum itu sendiri maupun terhadap penegak hukumnya. (Soemitro, 2001).

b. Teori Konsensus

Pada teori konsensus, dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum, yaitu sebagai dasar legalitas hukum. Pemungutan wajib pajak mempunyai sifat yang dapat dipaksakan karena pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang. (Soemitro, 2001).

2.3.3 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK 03/2003 tanggal 3 Juni 2003 adalah sebagai berikut:

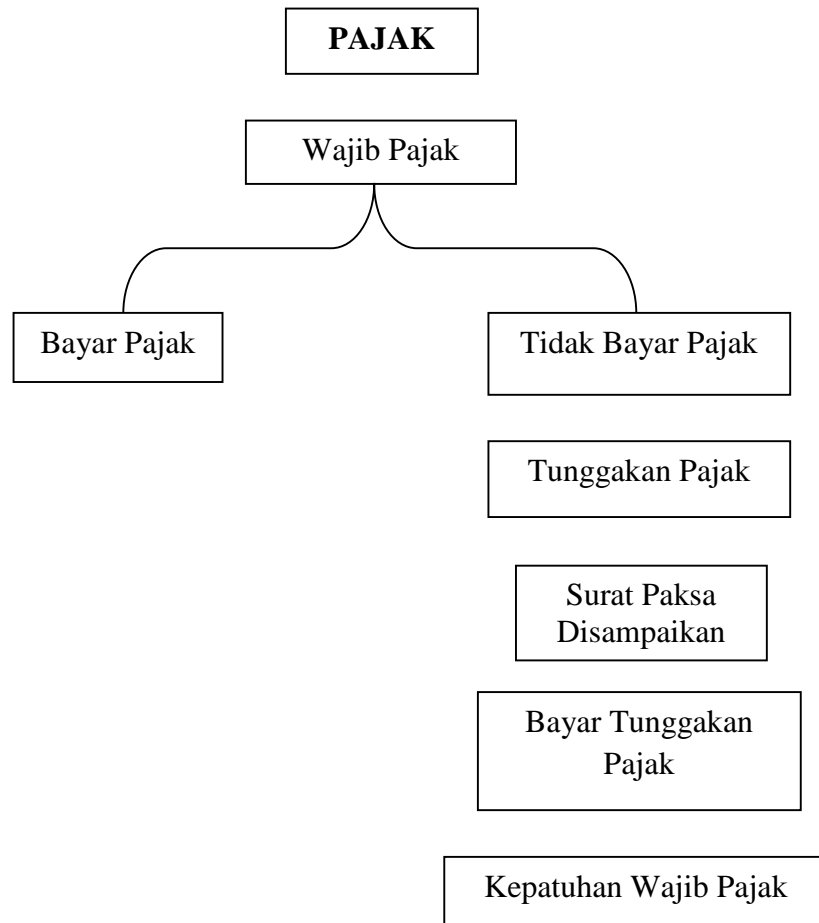
1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 hari masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam waktu 10 tahun.
5. Dalam hal laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik (yakni Akuntan yang tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat:

- a) Wajar tanpa pengecualian.
 - b) Wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal dimana laporan auditnya harus menyajikan Rekonsiliasi Laba Rugi Komersial dan Fiskal.
6. Dalam hal laporan keuangan tidak diaudit oleh Akuntan Publik, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh sepanjang memenuhi kriteria pada butir a sampai butir c di atas dan permohonan diajukan paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menerangkan bagaimana pengaruh penerapan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka penelitian penelitian dapat digambarkan dalam bentuk di bawah ini:

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran



2.5 Pajak dalam Pandangan Islam

Pajak ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum. Zakat ialah hak tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap kaum Muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam Quran disebut kalangan fakir miskin dan

mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan untuk mendekatkan diri kepadaNya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya.

Adapun persamaan antara zakat dan pajak yaitu:

1. Adanya unsur paksaan untuk mengeluarkan.
2. Keduanya disetorkan kepada lembaga pemerintah (dalam zakat dikenal amil zakat).
3. Pemerintah tidak memberikan imbalan tertentu kepada si pemberi.
4. Mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi, dan sosial.

Sedangkan perbedaan antara zakat dan pajak yaitu:

1. Dari segi nama dan etiketnya yang memberikan motivasi yang berbeda. Zakat: suci, tumbuh. Pajak (*dharaba*): upeti.
2. Mengenai hakikatnya. Zakat dikaitkan dengan masalah ibadah dalam rangka pendekatan diri kepada Allah, sedangkan pajak tidak.
3. Mengenai batas nisab dan ketentuannya. Nisab zakat sudah ditentukan oleh sang Pembuat Syariat, yang tidak bisa dikurangi atau ditambah-tambahi oleh siapapun juga. Sedangkan pada pajak bisa hal ini bisa berubah-ubah sesuai dengan policy pemerintah.
4. Mengenai kelestarian dan kelangsungannya. Zakat bersifat tetap dan terus menerus, sedangkan pajak bisa berubah-ubah.
5. Mengenai pengeluarannya. Sasaran zakat telah terang dan jelas, sedangkan pajak untuk pengeluaran umum negara.

6. Hubungannya dengan penguasa. Hubungan wajib pajak sangat erat dan tergantung kepada penguasa. Wajib zakat berhubungan dengan Tuhannya.
7. Maksud dan tujuan. Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak.

Berdasarkan point-point di atas dapatlah dikatakan bahwa “zakat adalah ibadat dan pajak sekaligus”. Karena sebagai pajak, zakat merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau membayarnya secara sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Adapun perintah mengeluarkan zakat dan mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kepentingan umat terkandung dalam Surat Al-Baqarah: 254.

وَلَا خُلٍّ فِيهِ لَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّ مِنْ قَبْ رَزَقْنَاكُمْ اَمْتُوا اَنْفِقُوا مِمَّا اَيَّاها الذِّينَ

وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim”

(Al-Baqarah: 254).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2003: 3), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan dalam pengertian yang luas, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2003:6)

3.1.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini termasuk pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu teknik pengolahan data dimana data-data yang berbentuk angka diklasifikasikan, dibandingkan dan dihitung dengan rumus-rumus yang relevan (Sugiyono, 2003:7).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat *ex post facto*, yakni mempelajari fakta-fakta yang sudah ada. Prosesnya berupa mendiskripsikan dengan cara menginterpretasi data yang telah diolah.

3.1.2 Data dan Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series* (runtut waktu) selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 mulai bulan Januari

sampai bulan Desember meliputi data jumlah surat paksa wajib pajak orang pribadi yang disampaikan dan dilunasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen, informasi, data-data yang diperoleh langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru, baik data yang diperoleh dari seksi penagihan maupun dari seksi administrasi.

3.1.3 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur (Sugiyono, 2003:11). Ada 2 definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah untuk segera membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang disampaikan oleh juru sita pajak negara, apabila utang pajak tersebut tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran dikeluarkan.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi

yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru yang mendapat surat paksa.

3.1.4 Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono (2003:38), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu:

a. Variabel Bebas atau *Independent Variabel* (X)

Variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel *dependen* (Indriantoro dan Supomo, 2002:64). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah surat paksa. Variabel ini diukur dari jumlah surat paksa yang disampaikan oleh KPP Pratama Tampan Pekanbaru selama periode 2009-2011.

b. Variabel Terikat atau *Dependent Variable* (Y)

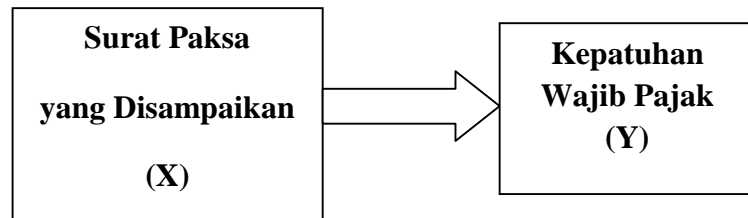
Variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel *independen* (Indriantoro dan Supomo, 2002:64). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel ini diukur dari kepatuhan wajib pajak dilihat dari banyaknya surat paksa yang dilunasi oleh wajib pajak setelah surat paksa disampaikan.

3.1.5 Model Penelitian

Untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada model penelitian berikut

ini:

Gambar III.1
Model Penelitian



Keterangan :

Variabel X = Surat paksa yang disampaikan

Variabel Y = Kepatuhan wajib pajak

3.1.6 Hipotesis

H_o : Tidak ada pengaruh penerapan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_a : Ada pengaruh penerapan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.1.7 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2003:90), populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan

Pekanbaru.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2003:91), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi yang mendapat surat paksa periode tahun 2009 sampai dengan 2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, yaitu dengan menggunakan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*). *Purposive sampling* adalah teknik memilih sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu, dalam penelitian ini hanya wajib pajak orang pribadi yang pernah mendapatkan penagihan dengan surat paksa.

3.2 Analisis Data dan Uji Hipotesis

Analisis data merupakan suatu proses pemecahan masalah agar tujuan penelitian dapat terpenuhi (Sukandarrumidi, 2002:47). Untuk itu diperlukan alat pendekatan masalah atau alat pemecahan masalah. Setelah semua data yang dibutuhkan telah dikumpulkan maka akan dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji linearitas, statistik deskriptif, uji regresi dan uji korelasi. Sedangkan untuk uji hipotesis dilakukan test statistik dengan uji koefisien regresi sederhana (uji T) dan uji

koefisien determinasi (uji R^2).

3.2.1 Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan sesuai dengan garis linear atau tidak, dengan kata lain apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *Test of Linearity* dengan pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (*linearity*) kurang dari 0,05 (Priyatno, 2008:36).

3.2.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti jumlah data, minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi.

3.2.3 Teknik Analisis

a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan satu variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Idriantoro dan Supomo, 2002 :66).

Persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y=a+b$$

Keterangan:

Y = kepatuhan wajib pajak

X = penagihan pajak dengan surat paksa

a = konstanta (nilai Y apabila X = 0)

b = koefisien regresi, yang menunjukkan arah regresi yaitu pada pengaruh variabel X terhadap variabel Y

b. Analisis Korelasi Sederhana

Analisis korelasi sederhana (*bivariate correlation*) digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara 2 variabel (Priyatno, 2008:53). Dalam penelitian ini analisis korelasi sederhana dilakukan dengan metode *Pearson Correlation (Product Moment Pearson)*.

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukan alat ukur ini benar- benar mengukur apa yang diukur, dengan rumus:

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n(\sum x^2) - (\sum x)^2)(n(\sum y^2) - (\sum y)^2)}}$$

dimana : R = koefisien korelasi

N = jumlah subjek

X = penagihan pajak dengan surat paksa

Y = kepatuhan wajib pajak

Dasar pengambilan keputusan dari uji validitas tersebut adalah :

- 1) Jika r hasil positif, serta r hasil $> r$ tabel, maka butir atau variabel tersebut valid.
- 2) Jika r hasil $> r$ tabel tapi bertanda negatif maka butir atau variabel tersebut tidak valid.

3.2.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan uji T dan uji R^2 .

a. Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji T)

Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji T) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Hipotesis

$H_0 : b < 0$, artinya tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel X dengan variabel Y.

$H_a : b > 0$, artinya terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel X dengan variabel Y.

2. Menentukan Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan alpha 5%. Signifikansi 5% atau 0,05 artinya penelitian ini menentukan risiko kesalahan dalam

mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% dan besar mengambil keputusan sedikitnya 95% (tingkat kepercayaan).

Signifikansi atau probabilitas adalah tingkat ketepatan dalam kaitannya dengan kesalahan pengambilan sampel dan merupakan jangkauan dimana nilai populasi yang tepat diperkirakan (Sarwono, 2009:25).

Uji ini menggunakan nilai p untuk menentukan signifikansi. Nilai p ini menunjukkan probabilitas hasil pengamatan (x) tidak memiliki efek atau hubungan dengan hipotesis nol (H_0), dinotasikan dengan $P(x | H_0)$. Nilai p menunjukkan besarnya probabilitas kebenaran hipotesis nol (H_0) saja tanpa ada hipotesis alternatif (H_A). Jika H_0 terbukti signifikan, maka bisa disimpulkan bahwa H_0 diterima.

3. Menentukan T Hitung

Untuk menentukan T hitung digunakan rumus sebagai berikut:

$$T \text{ Hitung} = \frac{b}{S_b}$$

Keterangan:

b : Koefisien regresi

S_b : Standar error

4. Menentukan T Tabel

Untuk menentukan T tabel dapat dicari pada tingkat signifikansi α

5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan atau *degrese of freedom* (df) = $n-k-1$ atau $36-1-1 = 34$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi, hasil diperoleh untuk T tabel sebesar 2,023 yang dapat dicari di MsExcel dengan cara pada sel kosong ketik $TINV(0,05;34)$ lalu enter.

5. Kriteria Pengujian

Hipotesis nol (H_0) adalah sebuah hipotesis yang berlawanan dengan teori yang akan dibuktikan. Sedangkan hipotesis alternatif (H_A) adalah sebuah hipotesis (kadang gabungan) yang berhubungan dengan teori yang akan dibuktikan. Nilai p (p value) yaitu probabilitas, mengasumsikan hipotesis nol benar (Sarwono, 2009:30).

Jika $T \text{ hitung} < T \text{ tabel}$ atau $P \text{ Value} > 0,05$ maka H_0 diterima (H_a ditolak), artinya bahwa variabel X dengan variabel Y tidak mempunyai pengaruh positif signifikan.

Jika $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$ atau jika $P \text{ Value} < 0,05$ maka H_0 ditolak (H_a diterima), artinya bahwa variabel X dengan variabel Y mempunyai pengaruh positif signifikan.

b. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. $R^2 = 0$, maka tidak ada

sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya $R^2 = 1$, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel independen. Koefisien determinasi dapat dicari dengan rumus :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = koefisien determinasi

r^2 = koefisien korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan Pekanbaru

Pada awalnya, di kota Pekanbaru hanya terdapat satu Kantor Pelayanan Pajak yaitu KPP Senapelan. Saat itu masih terdapat Kantor Pelayanan PBB Pekanbaru dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pekanbaru.

Seiring dengan perkembangan kota dan wilayah, kota Pekanbaru dibagi dalam dua kewilayahan kantor pelayanan pajak pada tahun 1999, yaitu KPP Pekanbaru Senapelan dan KPP Pekanbaru Tampan. Wilayah KPP Tampan meliputi wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kotamadya Pekanbaru (khusus kecamatan Payung Sekaki dan kecamatan Tampan). Saat itu kantor masih menempati sebuah ruko di jalan Riau Ujung Pekanbaru.

Berdirinya KPP Pratama Tampan Pekanbaru diawali dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep – 95/PJ./2008 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja Dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, Serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dan/Atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, **Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Dan Kepulauan Riau**, Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara pada tanggal 27 Mei 2008.

4.1.2 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang secara vertikal berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru beralamat di Jl. SM Amin (Ring Road Arengka II) Pekanbaru. Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

4.1.3 Tugas dan Wewenang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004 tanggal 24 Mei 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I, Kantor Pelayanan Pajak

Madya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I, struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru sebagai berikut:

a. Kepala Kantor

Kepala kantor wajib menerapkan prinsip organisasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak maupun antar satuan organisasi di lingkungan vertikal Direktorat Jenderal Pajak serta dengan instansi lain di luar instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan tugas pokok masing-masing, wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

b. Subbagian Umum

Tugas pokok bagian ini adalah melakukan tata cara penerimaan dokumen di Kantor Pelayanan Pajak, pemrosesan penatausahaan dokumen masuk di subbagian umum, penyampaian dokumen di Kantor Pelayanan Pajak, pelaksanaan penutupan buku kas umum, pembuatan laporan tahunan, dan lain-lain.

c. Seksi pengolahan data dan informasi

Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan tata cara pembentukan bank data, tata cara pemanfaatan bank data, peminjaman berkas data atau alat keterangan oleh seksi pengolahan data dan informasi kepada

seksi terkait, penatausahaan alat keterangan, pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi pengolahan data dan informasi, dan lain-lain.

d. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas memberitahukan tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, penyelesaian permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak, perubahan identitas wajib pajak, penyelesaian pemindahan wajib pajak di kantor pelayanan pajak lama dan baru, penatausahaan surat, dokumen dan laporan wajib pajak pada tempat pelayanan terpadu, dan lain-lain.

e. Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas memberitahukan tata cara penyelesaian permohonan penundaan pembayaran pajak, menerbitkan dan menyampaikan surat teguran penagihan, menerbitkan dan memberitahukan surat paksa, menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), dan lain-lain.

f. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan tata cara pemeriksaan kantor dan lapangan, menyelesaikan usulan pemeriksaan, menyelesaikan usulan pemeriksaan bukti permulaan, pemrosesan dan penatausahaan dokumen yang masuk di seksi pemeriksaan, penyelesaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan lebih bayar, dan lain-lain.

g. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan tata cara pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi ekstensifikasi

perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan atau pemutakhiran bank data perpajakan, pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan, penerbitan himbauan untuk ber-NPWP, dan lain-lain.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan tata cara pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Pengawasan dan Konsultasi, penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di KPP, penyelesaian permohonan perubahan metode pembukuan, pelaksanaan putusan gugatan atau banding, dan lain-lain.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Wajib Pajak Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru

Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disebut wajib pajak terdaftar. NPWP tersebut dipergunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Adapun jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel IV.1
Jumlah WP Terdaftar

No	Wajib Pajak	PKP	Non PKP	Total
1.	WP Badan	6.377	9.929	16.306
2.	WP Orang Pribadi	162	100.462	100.624
3.	WP Bendahara	4	1.506	1.510
	Jumlah WP			118.440

Sumber : KPP Pratama Tampan Pekanbaru

Data Per 11 Januari 2012

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah WP Badan yang terdaftar sebanyak 16.306, yang terdiri dari PKP sebanyak 6.377 dan Non PKP sebanyak 9.929. Jumlah WP Orang Pribadi yang terdaftar sebanyak 100.624, yang terdiri dari PKP sebanyak 162 dan Non PKP sebanyak 100.462. Sedangkan jumlah WP Bendahara yang terdaftar sebanyak 1.510, yang terdiri dari PKP sebanyak 4 dan Non PKP sebanyak 1.506. Adapun total keseluruhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru pada Januari 2012 adalah sebanyak 118.440.

4.2.2 Potensi Pajak dan Prospek Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru meliputi wilayah Tampan, Payung Sekaki, Marpoyan Damai, Bukit Raya, dan Sukajadi. Luas wilayah geografis sebesar 157,6 km² dengan jumlah penduduk tahun 2011 sekitar 318.000 jiwa merupakan potensi pajak yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dari segi

pajak untuk operasional negara. Adapun jumlah wajib pajak pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.2
Jumlah WP Terdaftar
Dati II / Kotamadya : Pekanbaru

No	Kecamatan	WP Badan	WP OP	WP Bendahara	Jumlah
1	Tampan	2.439	20.090	142	22.671
2	Bukit Raya	3.067	20.733	157	23.957
3	Sukajadi	3.137	16.504	1.007	20.648
4	Marpoyan Damai	4.138	22.520	151	26.809
5	Payung Sekaki	3.525	20.777	53	20.279
	Jumlah WP	16.306	100.624	1.510	118.440

Sumber : KPP Pratama Tampan Pekanbaru
Data Per Desember 2011

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak pada Kecamatan Tampan sebanyak 22.671, Kecamatan Bukit Raya sebanyak 23.957, Kecamatan Sukajadi sebanyak 20.648, Kecamatan Marpoyan Damai sebanyak 26.809, dan pada Kecamatan Payung Sekaki sebanyak 20.279 wajib pajak. Sedangkan total wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru pada Desember 2011 berjumlah 118.440 wajib pajak.

Sebagian besar wajib pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru bergerak dibidang perdagangan eceran dan jasa perorangan. Data selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel IV.3
Statistik Jumlah Wajib Pajak (WP)
Per Sektor Usaha

No	Sektor	Jumlah Wajib Pajak			
		WP Badan	WP OP	WP Bendaharawan	Jumlah
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	239	151	1	391
2	Perikanan	5	6	1	12
3	Pertambangan dan Penggalan	54	6	-	60
4	Industri Pengolahan	260	358	-	618
5	Listrik, Gas, dan Air	12	19	-	31
6	Konstruksi	2.083	56	-	2.139
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil; Sepeda Motor; serta Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	10.218	6.036	-	16.254
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	40	655	-	695
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	450	800	-	1.250
10	Perantara Keuangan	282	38	-	320
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	853	533	-	1.386
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	281	1.186	1.499	2.966
13	Jasa Pendidikan	372	49	6	427

14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137	224	1	362
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Kegiatan Lainnya	996	9.509	2	10.507
16	Jasa Perorangan	9	80.598	-	80.607
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	12	394	-	406
	TOTAL	16.303	100.618	1.510	118.431

*Sumber : KPP Pratama Tampan Pekanbaru
Data Per Desember 2012*

4.2.3 Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Waktu penagihan dengan surat paksa adalah 21 hari sejak diterbitkan surat teguran atau 28 hari setelah jatuh tempo pembayaran. Jika utang pajak dalam STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding tidak dilunasi oleh wajib pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat paksa. Proses penerbitan surat paksa dimulai ketika pelaksana seksi penagihan meneliti tunggakan utang pajak yang sudah bisa diterbitkan surat paksa dari daftar tunggakan pajak. Berdasarkan data tunggakan tersebut dibuat surat paksa rangkap dua oleh seksi penagihan. Pelaksanaan seksi penagihan dapat melihat daftar tunggakan pajak yang diterbitkan di dalam menu proses produksi sistem informasi penagihan.

Berikut ini daftar jumlah surat paksa wajib pajak orang pribadi yang disampaikan dan dilunasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru periode 2009-2011 :

Tabel IV.4
Surat Paksa WPOP yang Disampaikan dan Dilunasi pada
KPP Pratama Tampan Pekanbaru
Periode Tahun 2009-2011

Tahun	Bulan	Surat Paksa Disampaikan	Surat Paksa Dilunasi	Sisa	%
2009	Januari	20	15	5	75%
	Februari	40	30	10	75%
	Maret	52	40	12	77%
	April	53	30	23	57%
	Mei	33	25	8	76%
	Juni	27	16	11	59%
	Juli	41	31	10	76%
	Agustus	28	21	7	75%
	September	30	19	11	63%
	Oktober	22	12	10	55%
	November	49	29	20	59%
	Desember	21	15	6	71%
Jumlah		416	283	133	68%
2010	Januari	35	20	15	57%
	Februari	27	20	7	74%
	Maret	28	22	6	79%
	April	21	15	6	71%
	Mei	22	16	6	73%
	Juni	18	14	4	78%
	Juli	10	8	2	80%
	Agustus	28	20	8	71%
	September	19	10	9	53%
	Oktober	42	33	9	79%
	November	41	31	10	76%
	Desember	52	30	22	58%
	Jumlah	343	239	104	69%
	Januari	31	25	6	81%
	Februari	42	33	9	79%
	Maret	55	31	24	56%
	April	41	34	7	83%
	Mei	31	25	6	81%
	Juni	38	29	9	76%

	Juli	33	24	9	73%
	Agustus	23	19	4	83%
	September	39	28	11	72%
	Oktober	40	29	11	73%
	November	41	31	10	76%
	Desember	45	35	10	78%
	Jumlah	459	343	116	74%

*Sumber : KPP Pratama Tampan Pekanbaru
seksi penagihan pajak, tahun 2009*

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah surat paksa yang disampaikan pada tahun 2009 mencapai 416 lembar, surat paksa yang dilunasi sebanyak 283 lembar dan sisa surat paksa yang belum dilunasi adalah 133 lembar. Pada tahun 2010 surat paksa yang disampaikan mencapai 343 lembar, surat paksa yang dilunasi sebanyak 239 lembar dan sisa surat paksa yang belum dilunasi adalah 104 lembar. Sedangkan pada tahun 2011 surat paksa yang disampaikan mencapai 459 lembar, surat paksa yang dilunasi sebanyak 343 lembar dan sisa surat paksa yang belum dilunasi adalah 116 lembar.

4.3 Analisis dan Pengujian Hipotesis

4.3.1 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pemecahan masalah agar tujuan penelitian dapat terpenuhi. Untuk itu diperlukan alat pendekatan masalah atau alat pemecahan masalah. Setelah semua data yang dibutuhkan telah dikumpulkan untuk penelitian ini, maka akan dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut.

Berdasarkan perhitungan yang dibantu dengan program komputer yaitu *SPSS 16.0 for windows* diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Uji Linearitas

Tabel IV.5
Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan WP * Surat Paksa	Between Groups	(Combined)	2139.222	22	97.237	16.688	.000
		Linearity	1848.566	1	1848.566	317.246	.000
		Deviation from Linearity	290.656	21	13.841	2.375	.056
	Within Groups		75.750	13	5.827		
	Total		2214.972	35			

Sumber : Data Olahan SPSS 16

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada *Linearity* sebesar 0,000. Karena signifikansi kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel X (surat paksa) dan variabel Y (kepatuhan wajib pajak) terdapat hubungan yang linear.

b. Statistik Deskriptif

Tabel IV.6
Hasil Uji Analisis Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan WP	36	8.00	40.00	24.0278	7.95518
Surat Paksa	36	10.00	55.00	33.8333	11.30739
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data Olahan SPSS 16

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata kepatuhan wajib pajak dari tahun 2009-2011 adalah sebesar 24,0278 dengan standar deviasi sebesar 7,95518. Sedangkan rata-rata penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebesar 33,8333 dengan standar deviasi sebesar 11,30739.

Dapat diasumsikan jika WPOP yang terdaftar pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru periode 2009-2011 sebanyak 100, maka sebanyak 33 WPOP akan mendapatkan surat paksa dan sebanyak 24 WPOP akan melunasi tunggakan pajak setelah mendapatkan surat paksa.

c. Analisis Korelasi Sederhana

Analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu analisis ini dapat menunjukkan arah hubungan yang terjadi. Hubungan antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib Pajak diuji dengan koefisien korelasi *Pearson Product Moment* untuk

mengetahui apakah diantara kedua variabel itu terdapat hubungan atau tidak, maka digunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_a diterima dan jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_a ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel IV.7
Hasil Uji Analisis Korelasi Sederhana

Correlations		
	Kepatuhan WP	Surat Paksa
Kepatuhan WP	1	.914**
Pearson Correlation		
Sig. (2-tailed)		.000
N	36	36
Surat Paksa	.914**	1
Pearson Correlation		
Sig. (2-tailed)	.000	
N	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data Olahan SPSS 16

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa korelasi penagihan pajak dengan surat paksa (X) sebesar 0,914 > dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

d. Analisis Regresi Sederhana

Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak akan menghasilkan model (persamaan) yang dapat menggambarkan arah pengaruh kedua variabel tersebut. Berikut ini adalah hasil pengujian yang diperoleh:

Tabel IV.8
Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.282	1.748		1.306	.200
Surat Paksa	.643	.049	.914	13.097	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber : Data Olahan SPSS 16

Berdasarkan tabel *coefficients* di atas maka persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,282 + 0,643X$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta (nilai Y jika X=0) yang dihasilkan sebesar 2,282. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya penagihan dengan surat paksa, kepatuhan wajib pajak bernilai positif sebesar 2,282%.
- b. Koefisien regresi variabel penagihan pajak dengan surat paksa (X) sebesar 0,643, artinya jika penagihan pajak dengan surat paksa (X) mengalami peningkatan sebanyak 1 lembar maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 64,3%. Koefisien regresi bernilai positif, artinya terjadi pengaruh yang positif antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.2 Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji T)

Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji T) berguna untuk menguji hipotesis

yaitu apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini akan dilakukan uji t dengan uji 2 sisi (*two tailed test*) dan tingkat signifikansi 5%. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $P \text{ value} < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa variabel penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sebaliknya Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $P \text{ value} > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya bahwa variabel penagihan pajak dengan surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tabel distribusi t dicari pada tingkat signifikansi alpha 5% (uji 2 sisi) dengan *degree of freedom* (df) = $n-k-1$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel IV.9
Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.282	1.748		1.306	.200
Surat Paksa	.643	.049	.914	13.097	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa t_{hitung} untuk variabel penagihan pajak dengan surat paksa (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 13,097, berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($13,097 > 2,032$),

memiliki tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil daripada 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen atau penagihan pajak dengan surat paksa (X) mampu menjelaskan variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel IV.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.914 ^a	.835	.830	3.283

a. Predictors: (Constant), Surat Paksa

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Melihat hasil perhitungan di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,830 atau 83%, yang berarti bahwa 83% variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) bisa dijelaskan oleh variabel independen (penagihan pajak dengan surat paksa). Sedangkan sisanya sebesar 17% ($100\% - 83\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian.

4.4 Pembahasan

Pengaruh penerapan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap

kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru pada tahun 2009 s/d 2011 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel penagihan pajak dengan surat paksa (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan 13,097, berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($13,097 > 2,032$), dan memiliki tingkat signifikansi 0,000. Hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan koefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 0,830 atau 83%. Hal ini menunjukkan bahwa 83% variasi kepatuhan wajib pajak (Y) bisa dijelaskan oleh variasi dari penagihan pajak dengan surat paksa (X), sedangkan sisanya sebesar 17% ($100\% - 83\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijoyanti (2010) yang menunjukkan hasil bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa sebelum dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa, wajib pajak kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajibannya. Hal itu dapat dilihat dari wajib pajak yang tidak tepat waktu membayar utang pajaknya. Hal ini mungkin disebabkan oleh hal-hal seperti kondisi keuangan yang tidak mendukung, jauhnya jarak, kurangnya pemahaman (perubahan Undang-Undang Perpajakan), atau kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian dan analisis data yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($13,097 > 2,032$), dan memiliki tingkat signifikansi 0,000. Hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Koefisien determinasi menunjukkan 0,830 atau 83% yang artinya 83% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penagihan pajak dengan surat paksa. Sedangkan sisanya yaitu 17% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

- a. Penagihan pajak dengan surat paksa perlu ditingkatkan lagi dengan harapan kepatuhan wajib pajak akan lebih baik lagi. Karena persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dari penagihan pajak dengan surat paksa diharapkan timbul kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya perpajakannya.

- b. Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar kewajiban pajak hendaknya terus ditingkatkan oleh aparat pajak maupun wajib pajak. Upaya yang dapat dilakukan oleh aparat pajak salah satunya dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang *self assessment sistem* melalui sosialisasi kepada wajib pajak dan sebaiknya fiskus maupun aparat pajak memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat mendorong partisipasi wajib pajak secara sungguh-sungguh dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- c. Undang-Undang penagihan pajak diharapkan juga dapat memberikan penekanan yang lebih pada aspek keadilannya berupa keseimbangan kepentingan antara masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan itu berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah, adil serta memberikan kepastian hukum.
- d. Aparatur hukum hendaknya mengawasi dengan ketat pemungutan pajak agar tidak ada kecurangan dan memberi sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik karena persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi. 2002. Antisipasi Pemeriksaan Pajak Sehubungan dengan Himbauan Pembetulan SPT. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 2 (1), 31-35.
- Hutagaol, John. 2005. Self Asessment, Implementasi, dan Keandalannya. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4 (4), 24-26.
- Ilyas, B.Wirawan, dan Burian, Richad. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Istianah.2010. *Tatacara Penyitaan Terhadap Wajib Pajak Terutang dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.01/2002.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000.
- Liliawati, Eugenia. *Tanya Jawab Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jurnal Hukum Perpajakan. Edisi Kedua. Jakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Edisi 11. Yogyakarta: Andi.
- Nurmantu, Safri. 2003, *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pamungkas, Hanggoro. 2004. Perhitungan Pajak, Catatan Kecil. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 2 (8), 16-21.
- Purnawan. 2004, *Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Kaitannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak dan Aspek Keadilannya*. Jurnal Hukum, Vol 14 No. 1 Hal 33-51. Jakarta.
- Pemerintah RI. 2000. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pemerintah RI. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah.

Priyatno, Dwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Yogyakarta: Media Kom

Rusdji, Muhammad. 2005. *PSPP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta :Indeks.

Rusmawati, Siti. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi tidak Mengisi Sendiri SPT Tahunannya pada Kantor Pelayanan Pajak Tampan Kota Pekanbaru*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Sarwono, Jonathan. 2009. *Statistik Itu Mudah*. Yogyakarta: Andi

Soemitro, Rochmat. 2004. *Perpajakan*. Bandung: PT. Eresco.

Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian*. cetakan ke-7, Bandung: Alfabeta.

Sukandarrumidi, 2002. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 tentang pajak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Melakukan Tindakan Penagihan Pajak.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

www.detikfinance.com

www.wikiapbn.org/artikel/Penagihan_Pajak

Wijoyanti, Mayang. 2010. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan*. Skripsi Universitas Pembangunan Veteran. Jakarta.

Zain, Mohammad. 2003, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.

